

SIMPLIFIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2022

NO.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
1.	1 TAHUN 2022 Ditetapkan 12 Januari 2022 Diundangkan 20 Januari 2022 BNRI : Nomor 80	Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024	-	Berlaku
2.	2 TAHUN 2022 Ditetapkan 24 Januari 2022 Diundangkan 25 Januari 2022 BNRI : Nomor 97	Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2022	Pasal 11 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1671), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
3.	3 TAHUN 2022 Ditetapkan 16 Februari 2022 Diundangkan 24 Februari 2022 BNRI : Nomor 205	Kerja Sama Dalam Negeri	Pasal 40 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
4.	4 TAHUN 2022 Ditetapkan 7 Maret 2022 Diundangkan 15 Maret 2022 BNRI : Nomor 281	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	Pasal 67 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1192), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
5.	5 TAHUN 2022 Ditetapkan 25 Maret 2022 Diundangkan 5 April 2022 BNRI : Nomor 374	Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan	-	Berlaku

NO.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
6.	6 TAHUN 2022 Ditetapkan 25 Maret 2022 Diundangkan 5 April 2022 BNRI : Nomor 375	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional	-	Berlaku
7.	7 TAHUN 2022 Ditetapkan 25 Maret 2022 Diundangkan 5 April 2022 BNRI : Nomor 376	Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022	Pasal 26 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Dicabut PermenLHK No.2 Tahun 2023
8.	8 TAHUN 2022 Ditetapkan 19 April 2022 Diundangkan 26 April 2022 BNRI : Nomor 449	Perintisan Pengembangan Generasi Lingkungan	-	Berlaku
9	-	-	-	-
10	10 TAHUN 2022 Ditetapkan 12 Juli 2022 Diundangkan 22 Juli 2022 BNRI : Nomor 687	Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai Dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Pasal 40 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.32/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 296); b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 389); dan c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan RTnRHL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 390), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
11	11 TAHUN 2022 Ditetapkan 20 Juli 2022 Diundangkan 28 Juli 2022	Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	-	Berlaku

NO.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
	BNRI : Nomor 709			
12	12 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Juli 2022 Diundangkan 29 Juli 2022 BNRI : Nomor 718	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim	Pasal 23 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
13	13 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Juli 2022 Diundangkan 29 Juli 2022 BNRI : Nomor 719	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Berlaku
14	14 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Juli 2022 Diundangkan 29 Juli 2022 BNRI : Nomor 720	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan	Pasal 34 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.79/MENLHK/SETJEN/OTL.0/9/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1522); dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
15	15 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Juli 2022 Diundangkan 29 Juli 2022 BNRI : Nomor 721	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 212); dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 213), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku

NO.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
16	16 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Juli 2022 Diundangkan 29 Juli 2022 BNRI : Nomor 722	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari	Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 208), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
17	17 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Juli 2022 Diundangkan 29 Juli 2022 BNRI : Nomor 723	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	Pasal 59 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/MENLHK/SETJEN/OTL.0/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 832); dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku, Dirubah dengan PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022
18	18 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Juli 2022 Diundangkan 29 Juli 2022 BNRI : Nomor 724	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan	Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
19	19 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Juli 2022 Diundangkan 29 Juli 2022 BNRI : Nomor 725	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	Pasal 23 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
20	20 TAHUN 2022 Ditetapkan 22 Agustus 2022	Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum dalam Apendiks	Pasal 14 a. Perizinan Berusaha Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang	Berlaku

NO.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
	Diundangkan 29 Agustus 2022 BNRI : Nomor 817	<i>Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>	diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15); dan b. Izin Pengekar Dalam Negeri yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Pasal 15 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (<i>Gonystylus spp</i>) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1613/Kpts-II/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 168/KPTS-IV/2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (<i>Gonystylus spp</i>), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
21	21 TAHUN 2022 Ditetapkan 21 September 2022 Diundangkan 20 Oktober 2022 BNRI : Nomor 1064	Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon	-	Berlaku
22	22 TAHUN 2022 Ditetapkan 21 September 2022 Diundangkan 27 September 2022 BNRI : Nomor 990	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya	-	Berlaku
23	23 TAHUN 2022 Ditetapkan 13 Desember 2022 Diundangkan 20 Desember 2022 BNRI : Nomor 1299	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	-	Berlaku

NO.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
24	24 TAHUN 2022 Ditetapkan 19 Desember 2022 Diundangkan 22 Desember 2022 BNRI : Nomor 1308	Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pasal 6 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 585), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku
25	25 TAHUN 2022 Ditetapkan 26 Desember 2022 Diundangkan 28 Desember 2022 BNRI : Nomor 1348	Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pasal 12 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Peta Proses Bisnis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Berlaku